



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Menjegal Pembiayaan Janggal

Renovasi rumah dinas gubernur dan revitalisasi terminal disetujui.

Francisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

JAKARTA — Pembahasan rancangan anggaran DKI Jakarta berkejaran dengan waktu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya punya tempo hingga Jumat mendatang untuk *membrejeti* ribuan mata anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Hingga kemarin, kelima Komisi DPRD telah memangkas sejumlah program dengan pembiayaan yang mereka nilai janggal. Salah satu anggaran terakhir yang Dewan babat adalah biaya konsultan program revitalisasi Taman Margasatwa Ragunan. Dinas Kehutanan dan Pertamanan mengajukan Rp 75 miliar. "Ini adalah pemborosan," kata Ida Mahmudah, Ketua Komisi D, yang membidangi pembangunan, di Gedung DPRD, kemarin.

Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, Dinas Kehu-

tanan memotong sendiri permohonan yang mereka buat jadi Rp 55 miliar. Dewan menganggap angka itu masih kelewat mahal sehingga ditekan habis jadi Rp 4,4 miliar.

Pembiayaan jasa mendapat sorotan tajam oleh Dewan. Mereka hanya menyetujui Rp 6 miliar untuk membiayai konsultan rencana lokasi pembangunan pengolahan sampah *intermediate treatment facility*. Jauh lebih murah ketimbang pengajuan Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp 10 miliar.

Program yang sudah berjalan juga bisa kena pangkas. Misalnya, penataan permukiman kumuh yang berjalan sejak 2018 di Kampung Akuarium, Jakarta Utara. Komisi D mendapati anggaran untuk konsultan program *community action plan* (CAP) yang mencapai Rp 566 juta per rukun warga kemahalan. CAP adalah penjarangan kebutuhan masyarakat terkait dengan rencana penataan kawasan tempat tinggal mereka. Di KUA-PPAS 2020, CAP akan berlangsung di 76 rukun warga. "Kami

minta revisi. Kalau tidak, akan kami coret sebelum masuk Badan Anggaran,"

kata Ida. Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta mulai bersidang pekan depan untuk menetapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sebelumnya, Fraksi PDIP juga mempersoalkan pembiayaan lima *influencer* luar negeri untuk mempromosikan pariwisata Jakarta yang nilainya Rp 5 miliar. Dinas Pariwisata mundur teratur. Mereka menghapus program tersebut dan menggantinya dengan promosi melalui akun media sosial Pemprov DKI Jakarta. "Kami sudah menyesuaikan programnya," kata Asiantoro, Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Tentu saja tidak semua pengajuan dicoret. Komisi D memuluskan sejumlah pengajuan satuan kerja perangkat daerah. Salah satunya adalah renovasi rumah dinas gubernur. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta memperkirakan biayanya Rp 2,42 miliar.

Menurut Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang,

dan Pertanahan, Heru Herumawanto, tingginya biaya pemugaran karena griya di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, itu termasuk bangunan cagar budaya. Cagar budaya pantang diubah bentuk aslinya sehingga membutuhkan pengerjaan dengan ketelitian tinggi. "Komponen atap paling mahal, bisa ratusan juta rupiah karena menggunakan kayu jati," kata Heru.

Komisi B, yang membidangi perekonomian, menyetujui anggaran penyertaan modal daerah PT MRT Jakarta sebesar Rp 2,6 triliun dan program revitalisasi Terminal Kampung Rambutan senilai Rp 170 miliar. Persetujuan dilakukan setelah PT MRT Jakarta dan Dinas Perhubungan dinilai mampu menjelaskan secara detail peruntukan setiap anggaran dalam proyek tersebut. "Revitalisasi akan membuat terminal ini terintegrasi dengan banyak moda transportasi, yaitu kereta ringan, bus Transjakarta, Jak Lingko, dan bus antarkota," kata Sekretaris Komisi B, Pandapotan Sinaga. ●

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Menjegal Pembiayaan Janggal

Janggal di Sini, Ganjil di Sana

KEBIJAKAN Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara DKI Jakarta 2020 dipenuhi berbagai kejanggalan. Berawal dari pengungkapan anggaran pembelian lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat oleh William Aditya Sarana, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Solidaritas Indonesia, keganjilan lain bermunculan. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran malah mendapati total anggaran pembelian Aibon mencapai Rp 126,2 miliar di seluruh satuan kerja. Berikut ini di antaranya.

Buku folio	sejuta eksemplar	Rp 78,8 miliar	Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan
Meja pingpong	1.401 unit	Rp 8,9 miliar	Dinas Pemuda dan Olahraga
Lem Aibon		Rp 126,2 miliar	Seluruh SKPD
Septic tank	30 unit	Rp 166 miliar	Dinas Sumber Daya Air
Komputer	7.313 unit	Rp 132 miliar	Dinas Pendidikan
Konsultan Revitalisasi Taman Margasatwa Ragunan		Rp 75 miliar	Dinas Kehutanan
Pulpèn		Rp 123 miliar	Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur

● IMAM HAMDANI